

Dinamika Program Siaran TVRI Tahun 1969-1989

Anan Tawazun N.
Universitas Diponegoro
anan.tnkw12@gmail.com

Alamsyah
Universitas Diponegoro
alam_mahir@yahoo.com

Abstract

During the New Order era, economic development policies were the focus of the Soeharto administration. To implement development, the country's socio-political conditions needed to be controlled. This control was done through the utilisation of television as a tool to spread development messages. This mass media is very effective and efficient in shaping people's mindset. In carrying out its duties, TVRI does so through its broadcast programmes. However, people do not like TVRI's lighting broadcasts, they prefer entertainment broadcasts. Therefore, development messages began to be inserted into TVRI's entertainment broadcasts. This effort intensified after advertising was banned on television. At that time, almost all TVRI broadcasts were aimed at supporting development policies. This situation lasted until the New Order government collapsed

Keywords: Propaganda, Broadcast, TVRI, New Order.

Abstrak

Selama era Orde Baru, kebijakan pembangunan ekonomi menjadi fokus pemerintahan Soeharto. Untuk melaksanakan pembangunan, kondisi sosial-politik negara perlu dikontrol. Pengendalian ini dilakukan melalui pemanfaatan televisi sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan pembangunan. Media massa ini sangat efektif dan efisien dalam membentuk pola pikir masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TVRI melakukannya melalui program-program siarannya. Namun, masyarakat kurang menyukai siaran penerangan TVRI, mereka lebih menyukai siaran hiburan. Oleh karena itu, pesan-pesan pembangunan mulai disisipkan ke dalam siaran hiburan TVRI. Upaya ini semakin gencar dilakukan setelah iklan dilarang ditayangkan di televisi. Pada saat itu, hampir semua siaran TVRI ditujukan untuk mendukung kebijakan pembangunan. Situasi ini berlangsung hingga pemerintahan Orde Baru runtuh.

Kata kunci: Propaganda, Siaran, TVRI, Orde Baru.

1. Pendahuluan

Media massa merupakan komponen penting dalam proses komunikasi massa. Sepanjang sejarah, media massa digunakan untuk menginformasikan peristiwa ke masyarakat dengan tujuan menciptakan kesadaran masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Media massa berbentuk mulai dari surat kabar hingga televisi. Pengaruh televisi sangat besar dalam membentuk pandangan seseorang terhadap suatu peristiwa. Televisi memberi dampak positif maupun negatif kepada penontonnya. Televisi merupakan suatu alat yang bersifat politis karena televisi dapat disiarkan secara informatif, edukatif, dan rekreatif atau gabungan dari ketiganya.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan *channel* dan stasiun televisi pertama yang hadir di Indonesia, berdiri pada 24 Agustus 1962 berdasar kepada SK Menpen RI No.20/SK/VII/61. Pada saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke IV. Sebelum menyiarkan Asian Games, TVRI melakukan siaran ujicoba pada upacara peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1962. Uji coba yang berhasil ini menandakan bahwa Indonesia sudah siap untuk menyiarkan laga Asian Games. Selesai siaran Asian Games ke IV, dibentuklah Yayasan TVRI sebagai organisasi yang memayungi aktivitas televisi dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpin umum (Dhianita, 2021: 543).

Keluarnya Keppres No. 215/1963 menjadikan TVRI memiliki hak untuk menyiarkan televisi tanpa intervensi badan lain. Pada saat itu TVRI tidak mendapatkan dana dari presiden sehingga sumber pendanaannya berasal dari anggaran negara serta iklan. TVRI yang dipimpin langsung oleh seorang presiden menjadikan lembaga ini dipandang sebagai alat presiden untuk memperkuat kekuasaannya. Perubahan dalam kehidupan pers termasuk pertelevisian berlangsung sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan. Hal ini ditandai dengan hilangnya surat kabar-surat kabar yang kritis dan memastikan bahwa para pekerja dan pihak manajemen pers bertanggung jawab secara mutlak kepada pemerintah. Tindakan Soeharto jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pers (Hill, 2011: 7).

Akar konflik antara pemerintah-pers disebabkan oleh Soeharto yang menginginkan kekuasaan yang absolut. TVRI dijadikan pemerintah sebagai alat untuk melaksanakan tugas tersebut. Melalui program acara dan pemberitaan yang ditayangkan, hanya hal-hal yang baik saja yang diperlihatkan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Adapun hal-hal yang buruk tidak ditayangkan sama sekali. Keadaan ini yang menjadikan masyarakat seolah-olah mempunyai kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Sebenarnya program acara TVRI disusun dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi pada masa Orde Baru, acara-acara seperti “Kamera Ria”, “Dunia Dalam Berita”, “Si Unyil”, dan sebagainya tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kritik-kritik yang masuk melalui berbagai surat kabar. Ini menandakan bahwa masyarakat sadar adanya intervensi dari pemerintah. (Iswandi, 2013: 53)

Merujuk latar belakang di atas, TVRI memiliki kecenderungan untuk menampilkan program acaranya sesuai dengan arahan pemerintah Orde Baru. Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana perkembangan TVRI pada masa Orde Baru? 2) Bagaimana pelaksanaan siaran TVRI pada masa Orde Baru?

2. Pembahasan

Pada dasarnya, propaganda adalah kegiatan penerangan yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut sesuatu keyakinan, sikap, atau arah tindakan tertentu (Moeryanto, 2010: 40). Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan propaganda adalah usaha

pemerintah dalam membentuk pikiran masyarakat bahwa kebijakan pembangunan adalah kunci kesejahteraan. Adapun propaganda tersebut dilakukan melalui program siaran TVRI. Pada saat itu, program siaran TVRI adalah sumber informasi masyarakat. Melalui program siaran TVRI ini, pemerintah menyebarkan pesan-pesannya. Hal ini ditujukan agar kebijakan ekonomi bisa berjalan. Secara garis besar, propaganda-propaganda pemerintah dilakukan melalui siaran penerangan TVRI. Akan tetapi masyarakat tidak menyukai siaran tersebut. Dalam perkembangannya, pemerintah menyelipkan pesan-pesan pembangunan dalam siaran hiburan TVRI. Ini karena masyarakat lebih menyukai siaran tersebut. Pada kurun waktu 1969 hingga 1989, terjadi banyak perubahan terkait kebijakan pertelevisian. Perubahan-perubahan tersebut, mengganggu TVRI untuk berkembang. Akibatnya TVRI menjadi stagnan. Berdirinya televisi swasta pada tahun 1989 memperburuk keadaan TVRI, sehingga TVRI semakin ditinggalkan masyarakat.

2.1. Sejarah Televisi Republik Indonesia (TVRI)

Pada tanggal 25 Juli 1961, keluarnya Surat Keputusan Menteri Penerangan No.20/SK/M/1961 menandai berdirinya televisi di Indonesia. Ketika itu, perlombaan Asian Games ke IV sedang berlangsung di Jakarta. Penggunaan televisi sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat mulai intensif sejak Soeharto menjadi presiden. Pada saat itu, televisi digunakan untuk melakukan propaganda pemerintah. Masyarakat disugahi dengan hiburan dan informasi yang cenderung pada pemenuhan kepentingan politik pemerintah.

Pada tanggal 20 Oktober 1963, pemerintah mengeluarkan keputusan presiden mengenai aturan pembentukan Yayasan TVRI. Keppres No. 215/1963 ini menjelaskan bahwa TVRI adalah satu-satunya badan yang mempunyai wewenang untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia. Selain itu, TVRI diberi wewenang sebagai pengelola tunggal pertelevisian di Indonesia. Adapun TVRI ditujukan sebagai sarana komunikasi massa untuk pembangunan mental/spiritual, khususnya dalam pembentukan manusia sosialis. Pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 218/1963 yang merincikan tentang pembayaran iuran wajib bagi setiap pemilik pesawat televisi. Pada saat itu juga, TVRI mulai merintis pembangunan stasiun daerah. Pendirian stasiun daerah dimulai dari Yogyakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan seterusnya.

Pada tahun 1962-1963, siaran TVRI rata-rata satu/dua jam sehari. Isi dari program siaran TVRI mencerminkan fungsi TVRI sebagai pembangun mental bangsa. Akibatnya, siarannya berkembang menjadi media penerangan, pendidikan, hiburan, pembina kebudayaan. Dari sekian fungsi media TVRI, program acaranya dapat dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, siaran penerangan, pendidikan, dan kebudayaan yang memperoleh porsi sebesar 60% dari total jam tayang. *Kedua*, siaran hiburan yang memperoleh porsi sebesar 30% dari total jam tayang. *Ketiga*, siaran niaga/iklan yang memperoleh porsi sebesar 10% dari total jam tayang. Pada tahun 1964, jam siaran TVRI

meningkat menjadi 3,15 jam tiap hari, dengan komposisi acara yang sama. Jika dilihat dari komposisi siarannya, TVRI memiliki peran penting sebagai alat perjuangan.

Pada masa Orde Baru, TVRI bercorak monopolistik. Pihak swasta tidak terlibat dalam penyelenggaraan televisi. Meskipun begitu hubungan antara pemerintah dengan TVRI tidak mengikat. TVRI bisa beroperasi tanpa pertimbangan pemerintah. Pada 15 tahun pertama, siaran TVRI tidak membosankan. Pada saat itu, siaran TVRI condong bercorak menghibur, dengan sajian berupa film, musik, sandiwara, dan sebagainya. Adanya pemasukan dari iklan mendorong keberhasilan program TVRI. Setelah pemasukan dari iklan menghilang, kondisi TVRI menjadi stagnan. Pada saat itu, TVRI dimanfaatkan sebagai media pemerintah yang fungsinya sebagai media propaganda. TVRI diarahkan untuk selalu mendukung dan mempromosikan program pembangunan pemerintah. Keberhasilan program pembangunan dianggap sebagai indikator keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam membangun perekonomian.

Pada Juli 1976 Satelit Palapa mengudara, sehingga pemerintah bisa lebih giat untuk mengkampanyekan pembangunan nasional. Pada saat itu, jumlah pesawat televisi tercatat sekitar 512.000 unit. Pada tahun 1980, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 2.216.000 unit. Pada tahun 1980, penontonnya sudah sebanyak 60% dari total populasi di Indonesia. Pada tanggal 5 Januari 1981, Soeharto mengumumkan bahwa iklan di televisi akan ditiadakan. Dengan alasan agar TVRI memfokuskan dirinya pada pelaksanaan program-program pembangunan serta menghindarkan masyarakat dari efek buruk iklan. Ketika itu, siaran iklan digantikan dengan siaran pembangunan. Penayangan siaran pembangunan tidak disukai masyarakat. Masyarakat yang mempunyai parabola mengalihkan tontonannya pada siaran televisi Singapura, Thailand, dan Malaysia. Beralihnya tontonan masyarakat berpengaruh buruk bagi pemerintah. Hal ini karena pola pikir masyarakat bisa dibentuk melalui siaran-siaran asing.

Pelarangan iklan menyebabkan masyarakat untuk mengubah tontonannya. Dengan begitu kondisi TVRI semakin buruk karena ditinggalkan masyarakat. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1986. Pada saat itu, pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk mendirikan stasiun televisi. Melalui surat bernomor 190A/1987 pemerintah memberikan wewenang kepada TVRI untuk mengatur izin siaran televisi berlanggan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. TVRI dengan wewenangnya dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menyelenggarakan siaran televisi, dengan syarat bahwa pihak swasta wajib memberikan 12,5% dari penghasilan iklan mereka. Pada tanggal 28 Oktober 1987, RCTI secara resmi menjadi televisi swasta pertama yang berdiri di Indonesia. Dengan jangkauan sekitar Jakarta saja.

Keberhasilan RCTI mengundang berdirinya televisi swasta lain, seperti SCTV dan TPI. Meskipun televisi swasta mulai bermunculan bukan berarti pers sudah bebas. Pemilik RCTI adalah putra ketiga Soeharto yang bernama Bambang Trihatmodjo. Begitu pula dengan SCTV dan TPI yang dimiliki oleh Sudwikatmono, sepupu Soeharto dan Siti Hardiyati Sukmana, anak perempuan

Soeharto. Artinya pihak swasta sebenarnya adalah cara Soeharto mengatur situasi politik di Indonesia. Pengaturan ini diperjelas dengan tugas televisi swasta dalam mempromosikan proyek pembangunan nasional. Namun demikian, TPI disiarkan secara nasional. Hal ini mengundang kecemburuan dari televisi-televisi swasta lainnya. Kemudian pemerintah mengizinkan mereka untuk menyiarkan program acara mereka dengan lingkup nasional. Artinya saluran-saluran televisi ini bisa dinikmati secara gratis. Oleh karena itu, sejak saat itu cengkeraman Orde Baru menghilang.

2.2. Sarana dan Prasarana TVRI

Dalam menjalankan tugasnya, TVRI memerlukan dukungan pemerintah dengan bentuk perlengkapan teknik dan studio. Akan tetapi, dukungan dari pemerintah sulit direalisasikan. Padahal sejak tahun 1967, masyarakat sudah menuntut TVRI untuk meningkatkan kualitas siarannya. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki TVRI. Ketika TVRI berdiri, studio yang dibangun di Senayan hanya seluas 14 x 8 meter. Pada tahun 1967, TVRI mendirikan studio yang digunakan untuk pusat latihan dan merekam acara-acara tertentu. Perlengkapan yang seharusnya diganti setiap lima tahun, hingga tahun 1970 belum diganti. Selain itu, studio Senayan tidak mendukung *live programme* yang mana format siaran TVRI kebanyakan seperti itu.

Pada pertengahan tahun 1974 bersamaan dengan pengumuman penertiban iklan-iklan, Menteri Penerangan Mashuri mengatakan bahwa penertiban iklan di TVRI berhubungan erat dengan rencana penyempurnaan siaran televisi tahun 1976. Pada tanggal 9 Juli 1976, Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa (SKSD) mengudara. Akan tetapi, pembangunan stasiun *relay* dan antena pemancar belum selesai, sehingga masyarakat belum bisa menikmati siaran televisi karena komponen yang diperlukan belum dibangun. Sebagai contoh di Pontianak, masyarakat baru bisa menikmati siaran televisi setelah TVRI daerah Pontianak mempunyai stasiun *relay* yang berdiri pada Juni 1977.

Pada tahun 1980-an, mayoritas masyarakat sudah bisa menikmati siaran televisi. Di sisi lain, masyarakat tidak ingin menonton siaran TVRI karena siarannya difokuskan pada siaran pedesaan. Masyarakat kota lebih suka dengan siaran yang menghibur, sehingga mereka beralih pada siaran luar negeri yang menggunakan antena parabola. Melalui peralatan tersebut mereka bisa menikmati siaran televisi Malaysia, Singapura, atau Thailand. Peralihan tontonan masyarakat memberi efek negatif bagi pemerintah, sebab pola pikir masyarakat bisa terbentuk dari opini asing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan Sistem DBS (*Direct Broadcasting Satellite*).

Pada tahun 1980-an, TVRI memiliki sembilan stasiun penyiaran. Masing-masing stasiun penyiaran dilengkapi dengan stasiun-stasiun pemancar dan stasiun penghubung. TVRI juga memiliki 10 stasiun produksi keliling ke desa-desa, sehingga setiap desa bisa menikmati siaran TVRI. Ini menandakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki TVRI cukup memadai. Meskipun begitu, kualitas siarannya masih buruk. Kondisi ini disebabkan oleh tersebarnya tenaga ahli berpengalaman yang ditugaskan untuk mengelola studio-studio baru. Adanya ketimpangan antara jumlah sarana dan prasarana dengan tenaga ahli yang dimiliki TVRI menjadi persoalan baru. TVRI harus melatih karyawan baru untuk menyaingi keterampilan tenaga ahli berpengalaman. Hanya saja untuk melatih keterampilan diperlukan waktu yang lama. Hal ini menjadikan TVRI sulit untuk berkembang.

2.3. Program Siaran Penerangan

Menurut Soeharto, Program siaran penerangan berfungsi membantu masyarakat memahami suatu masalah di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, program ini berfungsi sebagai penstabil situasi sosial-politik dan kontrol sosial. Program ini ditampilkan melalui siaran berita seperti “Dunia Dalam Berita”, “Siaran Berita”, “Laporan Luar Negeri”, “Laporan Pembangunan”, dan sebagainya. Dalam menjalankan kepentingan tersebut, TVRI menampilkannya dalam bentuk upacara, pidato, dan wawancara dengan tokoh nasional pada siaran berita. Masyarakat sadar bahwa ada intervensi pemerintah dalam siaran berita TVRI sebab mereka tahu bahwa fungsi televisi adalah memberi penerangan. Namun demikian, masyarakat mengkritik cara pemerintah menayangkan siaran penerangan. Masyarakat berharap bahwa siaran penerangan dibuat menjadi menarik.

Keputusan menyajikan siaran hiburan yang diselengi penyampaian pesan-pesan pembangunan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh drs. P. Dalimunthe. Sebagai contoh, pada program acara “Kamera Ria”. Program yang mulai tayang pada tahun 1964 ini adalah kolaborasi antara ABRI dan TVRI dengan tujuan sebagai hiburan. Dalam perkembangannya, program ini menyampaikan pesan-pesan ABRI kepada masyarakat. Pesan-pesan dari ABRI disampaikan secara halus kepada masyarakat melalui lagu-lagu yang dibawa para artis dan penyanyi.

Pada Mei 1975, Menteri Penerangan Mashuri mengatakan bahwa siaran TVRI akan disempurnakan. Ketika itu, pemerintah mengurangi porsi iklan di televisi, menghentikan impor film-film asing, dan merencanakan peluncuran SKSD Palapa (Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa). Kebijakan ini menegaskan peran TVRI sebagai pembina pembangunan. Penyempurnaan siaran dimaksudkan agar isi maupun kualitas siaran TVRI sesuai kepentingan pembangunan nasional. Isinya juga perlu menampilkan keserasian antara apa yang dibutuhkan masyarakat di bidang penerangan dan pendidikan, serta apa yang menjadi selera masyarakat di bidang hiburan. Jadi kebijakan ini ditujukan agar kontrol sosial tetap berjalan tanpa mengganggu kesenangan masyarakat.

Pada tahun 1976 Satelit Palapa mengudara. Hal ini menandakan bahwa siaran TVRI bisa dinikmati oleh masyarakat yang berada di luar Jawa. Dengan meluasnya jangkauan siaran, penyusunan acara TVRI perlu dilakukan dengan hati-hati. Nilai-nilai dan budaya masyarakat yang beragam harus diperhatikan dalam menyusun siaran. Tujuannya agar pesan-pesan pembangunan mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

Pada tahun 1981, pemerintah melarang TVRI untuk menayangkan iklan. Jam-jam yang kosong karena hilangnya siaran iklan digantikan dengan siaran pembangunan. Ada 19 program acara untuk menggantikan lebih dari 30 jam siaran yang kosong. Program-program tersebut yaitu “Daerah Membangun”, “Dari Desa ke Desa”, “Desa Kita”, “Wanita dan Pembangunan”, “Krida Remaja”, “Siaran Berita Terakhir”, dan sebagainya. Program-program tersebut diarahkan kepada penerangan yang bermanfaat dan bersifat edukatif bagi masyarakat untuk memelihara idealisme pembangunan. Pada saat itu, siaran TVRI difokuskan kepada masyarakat desa, dengan tujuan agar mereka bisa dibujuk untuk aktif melakukan pembangunan.

Dengan munculnya siaran pembangunan yang menghibur, maka penyebaran pesan-pesan pembangunan semakin efektif. Sebagai contoh, pada acara “Kelompencapir” yang disutradarai oleh Departemen Penerangan. Acara ini berisikan fatwa-fatwa Soeharto kepada masyarakat. Menurut Agus Maladi Irianto, penyutradaraan acara “Kelompencapir” oleh Departemen Penerangan bertujuan untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan. Dalam acara tersebut, Soeharto bertemu dengan kelompok masyarakat kecil. Akan tetapi, kelompok masyarakat tersebut diperagakan oleh petugas penyuluhan pertanian dan karyawan Departemen Penerangan. Agus Maladi Irianto mengatakan bahwa acara ini bertujuan mengkonsolidasikan topik-topik masyarakat desa tanpa membicarakan tentang persoalan politik. Acara ini juga dirancang dan diarahkan kepada suatu gambaran bahwa pemerintah adalah sumber informasi utama. (Irianto, 2014: 31-32).

Munculnya televisi swasta menjadi penyebab kemunduran TVRI. Kemunduran ini disebabkan oleh pembatasan ruang gerak TVRI oleh pemerintah. Hampir seluruh program siarannya berisikan tentang misi pemerintah seperti program KB, transmigrasi, pertanian, dan sebagainya. Di sisi lain, pemerintah mengizinkan televisi swasta untuk menyiarkan programnya asalkan tidak melanggar susila, agama, dan tidak menyinggung perbedaan suku. Meskipun begitu, penayangan berita masih menjadi hak eksklusif TVRI sehingga pemerintah masih mengatur arus informasi yang beredar di masyarakat. Dalam intruksi Menpen tahun 1990 dijelaskan bahwa selain dilarang memproduksi berita, televisi swasta diwajibkan untuk *me-relay* siaran “Berita Nasional” dan “Dunia Dalam Berita” pada jam yang sama. Menteri Penerangan Harmoko bersikeras bahwa tugas stasiun televisi swasta bukanlah memproduksi berita. Produski berita adalah hak eksklusif TVRI. Akan tetapi RCTI tidak menaati instruksi tersebut. Siaran berita RCTI ternyata lebih menarik dibandingkan dengan siaran berita TVRI. Sejak saat itu cengkeraman monopoli pemerintah atas siaran televisi pelan-pelan menghilang.

2.4. Program Siaran Niaga/Iklan

Program siaran niaga/iklan muncul sejak tahun 1963. Pada saat itu, tiga periklanan komersial ditayangkan dengan model gambar-gambar yang ditampilkan pada sebuah presentasi atau *slide*. Adapun ketiga iklan tersebut adalah iklan Hotel Tjipajung, PT Masayu, dan PT Arschoob Ramasita. Iklan yang ditayangkan melalui televisi menarik perhatian para pengusaha untuk memasarkan produk-produknya. Mereka berpikir bahwa pemasaran seperti ini memiliki pengaruh lebih besar daripada melalui surat kabar dan radio. Sejak saat itu, permintaan pemasangan iklan di TVRI meningkat. Bagi TVRI, iklan memberikan dampak positif sebab menambah pendapatannya. Melimpahnya pendapatan iklan menjadikan TVRI beroperasi tanpa meminta izin dari departemen lain, dan memiliki kebebasan finansial.

Pada tahun 1970-an, penayangan iklan yang berlebihan membuat kesal masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan penertiban iklan pada tahun 1974. Pemerintah menganggap iklan adalah suatu penggambaran hidup mewah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan karakter masyarakat, yang mayoritasnya penduduk desa. Jika iklan sering ditayangkan di TVRI, pemerintah khawatir akan terjadi perpecahan akibat dari perbedaan sosial.

Pada Desember 1976, TVRI membuat program baru yang berjudul “Manasuka Siaran Niaga”. Program ini merupakan pengelompokan iklan pada jam-jam tertentu di TVRI. Tujuan dibuat program “Manasuka Siaran Niaga” adalah untuk menghindarkan masyarakat dari rasa terganggu apabila iklan masuk di tengah-tengah acara. Pembatasan tersebut menandakan bahwa porsi iklan semakin sedikit. Meskipun begitu, 40% dari total anggaran TVRI bergantung pada siaran iklan. Iklan berdampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah membatasi iklan karena pola konsumsi masyarakat berubah dengan menyampingkan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka.

Pada tahun 1981, pemerintah melarang TVRI untuk menayangkan iklan. Akibatnya, TVRI hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah. Namun, subsidi yang diberikan pemerintah tidak cukup dan tidak bisa menutupi seluruh anggaran yang dikeluarkan TVRI. Agar tetap bisa beroperasi, TVRI terkadang menampilkan iklan-iklan terselubung. Misalnya sebelum sebuah album kaset dipasarkan, terlebih dahulu lagu tersebut disiarkan melalui siaran hiburan TVRI. Perilaku tersebut menjadikan siaran hiburan khususnya siaran musik, ditampilkan tanpa memilah kualitas lagu yang dibawakan.

Iklan terselubung tidak terjadi pada siaran hiburan TVRI saja. Hampir semua siaran TVRI berbau iklan. Misalnya pada siaran “Varia Ilmu & Pendidikan” yang notabene merupakan siaran pendidikan. Program ini bertujuan menampilkan kegiatan-kegiatan berbagai lembaga pendidikan. Akan tetapi, kebanyakan yang tampil adalah kampus-kampus swasta baru. Siaran berita juga mengalami hal tersebut. Perilaku-perilaku seperti ini ditujukan agar TVRI tetap beroperasi dengan normal. Akan tetapi, pada saat TVRI kesusahan untuk menutup anggarannya. Pemerintah justru mengizinkan televisi swasta untuk menayangkan iklan. Namun demikian, diizinkan televisi

swasta untuk menayangkan iklan tidak merugikan TVRI karena TVRI memperoleh presentase keuntungan dari penayangan iklan televisi swasta.

Skema pembagian keuntungan TVRI dengan televisi swasta bertujuan untuk membantu mereka dalam membina siarannya. Pada saat itu, TVRI mewajibkan setiap televisi swasta memberi 12,5% dari pendapatan iklan mereka. Iklan yang boleh ditayangkan televisi swasta dibatasi oleh Departemen Penerangan sebanyak 15% dari total jam tayang mereka. Kebijakan pelarangan iklan menjadikan pertelevisian tidak bisa berkembang dengan karakter industri. Hal ini karena pada saat pemerintah menggalakkan pemakaian produk dalam negeri. Televisi sebagai sarana promosi efektif maupun sarana penumbuh apresiasi tidak diberikan kesempatan untuk berperan. Padahal jangkauan siaran iklan TVRI sangat luas.

3. Simpulan

Pada masa Orde Baru, TVRI adalah alat pemerintah untuk menyebarkan pesan-pesan pembangunan. Pesan tersebut disampaikan melalui siaran-siaran TVRI. Pada awal Orde Baru, siaran penerangan adalah cara pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesannya. Akan tetapi, masyarakat tidak menyukai siaran tersebut. Masyarakat lebih menyukai siaran hiburan mereka. Mengetahui hal tersebut, pemerintah mulai menggunakan siaran hiburan TVRI untuk menyampaikan kepentingannya. Contohnya pada acara “Kamera Ria” dan “Si Unyil”. Pada tahun 1981, dengan dilarangnya iklan tayang di televisi. Program siaran TVRI diarahkan kepada penerangan yang bermanfaat dan bersifat edukatif bagi masyarakat. Pada saat itu, mayoritas program siaran TVRI berisikan misi pemerintah mengenai pembangunan. Siaran tersebut tidak disukai masyarakat, sehingga mereka meninggalkan siaran TVRI. Hal tersebut terjadi sampai stasiun televisi swasta berdiri. Namun demikian, munculnya stasiun televisi swasta justru membuat TVRI semakin terpuruk. Dengan begitu, posisi TVRI sebagai sumber informasi masyarakat tergantikan dengan adanya televisi swasta.

Daftar Pustaka

Anugrah, Memo Leo, “Kebijakan Penghapusan Iklan Di TVRI Pada Tahun 1981-2002”, *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah* Vol. 7 No. 1, (Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019).

Armando, Ade, *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2011).

Darmanto, *Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Samdra Biru, 2020).

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah* terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975).

Hadi, Dwi Wahyono dan Gayung Kasuma, “Propaganda Orde Baru 1966-1988” dalam *Jurnal Verleden* Vol. 1 No. 1, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012).

- Hill, David T., *Pers di Masa Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
- Hutagalung, Inge, “Dinamika Sistem Pers di Indonesia” dalam *Jurnal Interaksi* Vol. II No. 2, (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2013).
- Hutomo, Setio Budi Hendro, “Industri Televisi Swasta Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 1 No. 1, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004).
- Imron, Sariyatun, Tri Yunianto, “Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru” dalam *Jurnal Candi* Vol. 13 No. 1, (Solo: Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, 2016).
- Irianto, Agus Maladi, *Media dan Kekuasaan: Antropologi Membaca Dunia Kontemporer*, (Gigih Pustaka Mandiri, 2014).
- Masita, Adhitia, “Perkembangan TVRI Stasiun Jawa Tengah Dari Monopoli Sampai Masa Persaingan Televisi Swasta Tahun 1982-2005 Di Semarang”, (Skripsi pada Program Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Semarang, 2007).
- Munthe, Moeryanto Ginting, “Propaganda dan Ilmu Komunikasi”, *Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta*: Vol 2 No. 2 (Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010).
- Murtiningsih, Siti dan Joko Soswanto, “Pembungkaman Pers Masa Orde Baru” dalam *Jurnal Filsafat Seri ke-29*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1999).
- Nugroho, Putri, dan Laksmi, *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia* (Edisi Bahasa Indonesia), (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012).
- Nugroho, Y., Dwitri Amalia, dkk, *Televisi Indonesia: Dinamika Struktur dan Khalayak*, (Jakarta: Ford Foundation Indonesia, 2015).
- Nurhayati, Meti, “Kebijakan Pemberitaan Kantor Berita Antara Di Era Konvergensi Media”, *Jurnal Imiah Ilmu Komunikasi* Vol. 20 No. 2, (Universitas Gunadarma Depok, 2021).
- Pertiwi, Dhianita Kusuma, *Mengenal Orde Baru*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021).
- Said, Salim, *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016).
- Sejarah Departemen Penerangan RI*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1986).
- Saptohadi, Satrio, “Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia” dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 1, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2011).
- Setio Budi HH, “Industri Televisi Swasta Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik” dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 1 no. 1, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004).
- Syahputra, Iswandi, *Rezim Media Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotainment dalam Industri Televisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Wendy, Fensya Lenggotama, “Strategi Perancangan Program Acara Hiburan Di Televisi Publik Indonesia”, (Skripsi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung, 2016).